

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PLENO KOMISI III DPR RI TERHADAP  
UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST)  
CALON KAPOLRI**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2013-2014  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Fit and Proper Test.  
Hari/tanggal : Kamis, 17 Oktober 2013  
Pukul : 10.10 – 22.35 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : DR. Pieter C. Zulkifli Simabuea, MH / Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, SH, MSi / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.  
Hadir : 47 orang Anggota dari 52 Anggota Komisi III DPR-RI.  
Ijin : 2 orang anggota.  
Acara :  
1. Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs.Sutarman.  
2. Pengambilan Keputusan.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.10 Wib oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Pieter C. Zulkifli Simabuea, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

**II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan dalam penyampaian visi dan misi oleh calon Kapolri, diantaranya sebagai berikut:
  - Pengamanan pemilu yang diwujudkan melalui pemantapan situasi kamtibmas yang kondusif dan menjamin netralitas anggota Polri.
  - Peningkatan pengungkapan kasus korupsi dan kasus prioritas secara terkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan.

- Peningkatan penanggulangan terorisme serta pengembangan program deradikalisasi dan reedukasi yang terkoordinasi, terutama mengungkap kasus penembakan anggota Polri.
  - Penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan Tupoksi, peran secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas pada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencegah praktik KKN.
  - Penguatan Harkamtibmas dengan *early detection system dan early warning* untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen dan penguatan program Babinkamtibmas: satu polisi satu desa. Serta mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
  - Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat meliputi kejahatan konvensional, transnasional, dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara.
  - Penguatan kerjasama kementerian/lmbaga, criminal justice system (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama diarahkan pada Pemilu 2014 dan penanganan konflik sosial.
  - Mengembangkan sistem pembinaan personel melalui rekrutmen dan pembinaan karier bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), transparan, akuntabel, humanis, untuk menghasilkan pimpinan yang berintegritas di semua strata.
  - Meningkatkan profesionalisme yang meliputi diklat di bidang Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat.
  - Peningkatan akseptabilitas pelayanan publik kepada masyarakat yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat.
  - Penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari KKN.
  - Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Polri pada Grandstra Polri 2005-2025, menyelesaikan rencana strategis 2000-2024, serta menyiapkan landasan rencana strategis 2015-2019 dan Grandstra tahap III (2015-2025) melalui percepatan program RBP, Quick Wins, dan Penguatan Perundang-undangan terkait Polri.
- Pemaparan lengkap telah disampaikan secara tertulis oleh Calon Kapolri kepada seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- Calon Kapolri dianggap amat loyal pada pimpinan, mohon dijelaskan, bagaimana sikap Kapolri dalam Pemilu Tahun 2014.
- Klarifikasi tentang issue calon mendukung salah satu calon presiden dari partai tertentu.
- Klarifikasi terkait bisnis hotel di Palembang dan Bandung yang Calon miliki.
- Upaya-upaya yang betul-betul terlihat untuk memastikan tidak terjadi KKN dalam rekrutmen anggota Polri.
- Komitmen dalam penuntasan beberapa kasus, diantaranya kasus Gayus Tambunan yang diduga mengalirkan sejumlah dana ke petinggi Polri, kasus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di peti es kan, dan kasus Labora Sitorus.
- Banyak kasus korupsi yang dapat ditangani Polri, namun banyak yang ditangani instansi lain, antara lain KPK, sebagai contoh kasus yang terkait dengan bunda putri.
- Banyak keluhan yang dialami oleh Polsek, dimana polsek belum dapat dukungan penuh dari Mabes dalam pembangunan Sarpras.

- Terkait dengan usulan Polwan yang ingin memakai jilbab, bagaimana realisasinya.
- Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan mendasar di Polri, misalnya ketika Kapolri, Timur Pradopo mengakui ada permasalahan mendasar, sehingga muncul keroyok researse, Lantas dan rekrutmen personil.
- Perlu pemberian sanksi yang tegas kepada para petugas Polri yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya.
- Apa langkah-langkah calon Kapolri dalam hadapi sorotan terhadap Polri khususnya Polri salah satu lembaga terkorup, termasuk penanganan narkoba dan terorisme.
- Program Lemdikpol yang bagus saat ini baru diatas kertas, bagaimana komitmen kedepan.
- Bahwa calo Kapolri sangat banyak menyampaikan prom dan strategi yakni 4 strategi, 54 program dan 12 program prioritas, mana sebenarnya yang menjadi unggulan? Misalnya mantan Kapolri Sutanto dengan program unggulannya pemberantasan perjudian dan mantan Kapolri Bambang Hendarso dengan program quick win serta Kapolri saat ini Jenderal Pol.Drs.Timur Pradopo dengan program keroyok serse.
- Terkait dengan penanganan terorisme selama ini bagaimana strategi calon Kapolri, mengingat saat ini bukan lagi permasalahan ideologi namun dendam kepada institusi Polri.
- Apa yang akan calon Kapolri lakukan untuk mengatasi gesekan antara personil TNI dan Polri.
- Meminta penjelasan terkait penempatan dalam Biro Binkar (Pembinaan Karier) yang terkesan bukan berdasar merit system tetapi like and dislike.
- Meminta penjelasan terkait 4 rekening calon Kapolri yang ditutup Tahun 2008.
- Sebagaimana yang diInformasikan oleh Kopolnas, bahwa terkait “penyerbuan” anggota Polri ke KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan, ada yang menekan calon untuk melakukan itu, siapakah yang melakukan hal tersebut.
- Terkait dengan kasus pembunuhan Holly Angela, apakah kasusnya tidak seperti kasus Antasari, informasinya tersangka merupakan auditor BPK yang dikenal sangat tegas, apakah ada motif politik terkait pembunuhan tersebut.
- Dalam jangka waktu 100 hari, sanggupkah calon mengungkap kasus penembakan anggota Polri dan mengungkap kasus korupsi skala besar seperti kasus Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
- Polri memiliki kemampuan alat sadap yang canggih tidak kalah dari KPK, bagaimana kalau dibentuk densus Tipikor di Kepolisian.
- Penuntasan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut Andi Nurpati.
- Bahwa dinilai calon terlalu loyal pada atasan, apakah calon berani menolak jika diperintah Presiden untuk mendukung partai tertentu.
- Calon diusulkan Kopolnas karena merupakan calon terbaik, dapatkan calon memberikan dan menumbuhkan rasa bangga anggota Polri dalam memberikan rasa aman masyarakat.
- Bagaimana konsep Sistem Pembinaan Karier, misalnya karir yang bertugas dari Polda Metro lalu berpindah ke Polda NTT dengan jabatan yang biasa.
- Penyelesaian kasus Labora Sitorus, kasus pemalsuan surat MK, dan penembakan anggota Polri.
- Bagaimana sistem pengawalan sehingga ada dinamit hilang.
- Kasus provost yang melakukan pengawalan truk tengah malam, apakah ada surat tugas.

- Terhadap kasus Novel Baswedan yang sebetulnya dianggap tidak loyal karena berhenti di jalan, padahal jelas melanggar aturan internal.
- Dalam kasus pemilukada, Polri tidak menangani yang menjadi kewenangannya, justru yang bukan kewenangannya ditangani oleh Kepolisian, misalnya dalam kasus di Provinsi Sulbar.
- Meminta calo Kapolri pro aktif dalam penelusuran kasus yang terkait bunda putri dan harapan penuntasan kasus narkoba yang lebih baik.
- Apa kekhususan dari visi dan misi calon Kapolri, dibandingkan para Kapolri sebelumnya.
- Bagaimana dgn sistem Polmas, saat ini yang terlihat Babinsa (Bintara Pembina Desa).
- Bagaimana upaya menghilangkan pungli termasuk di Lembaga Pendidikan Polri.
- Upaya yang dilakukan untuk menjelaskan kenaikan pangkat KBP menjadi Brigjen yang tidak sesuai prosedur.
- Banyak kantor polisi yang dirusak dan anggota polisi yang diserang karena ulah dengan oknum polisi, apa yang calon akan dilakukan terhadap hal tersebut.
- Strategi pemberantasan korupsi baik secara internal Polri dan eksternal.
- Polisi sering digunakan sebagai bumper dalam bisnis seperti banyak terjadi di Surabaya.
- Tingkat kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi, apa yang calon Kapolri akan lakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dimaksud.
- Bahwa masih banyak permasalahan kultur, khususnya dalam rekrutmen, penempatan dan pelayanan masyarakat.
- Bahwa tidak hanya siswa yang diperhatikan, namun juga instruktur, *gadik* termasuk *binkarnya*.
- Peningkatan *kerma* lintas sektoral, tidak hanya dengan TNI, tetapi juga dengan *polsus* dan PPNS.
- Bagaimana menanamkan semangat kepada *Bhabinkamtibmas*, karena mereka kadang tidak tahu apa tugasnya, dan merasa sebagai orang-orang yang tidak dibutuhkan.
- Meminta penjelasan mengenai kasus-kasus, seperti kasus tawuran dan balap liar di Jakarta, serta kasus penyelesaian kaum minoritas tertindas.
- Berdasarkan paparan calon Kapolri terdapat over prestasi dalam penanganan perkara, anggarannya dari mana dan sisa kasus bagaimana?
- Bagaimana calon Kapolri akan mengalami masa transisi kepemimpinan di Polri.
- Apa inovasi dan program prioritas apa saja yang akan dilaksanakan oleh Calon Kapolri.
- Banyak kasus yang berulang tahun tidak kunjung selesai, apa yang akan calon prioritaskan dalam penuntasan penyelesaian perkara.
- Kepemimpinan Kapolri saat ini merupakan titik nadzir Polri dengan KPK, tidak banyak anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Bahkan ada wacana rekrutmen penyidik dari TNI. Apa yang akan dilakukan oleh calon Kapolri untuk memperbaiki hubungan Polri dengan KPK.
- Apa komitmen visi kebangsaan dalam komitmen menjaga komitmen NKRI.
- Bagaimana strategi menciptakan Polri yang dicintai masyarakat.
- Bagaimana Calon Kapolri melakukan pemberantasan premanisme, judi, narkoba, serta menindak aparat yang terlibat serta langkah-langkah pencegahan.

- Bagaimana manajemen holistik penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Calon Kapolri.
- Bentuk-bentuk seperti apa persiapan pelatihan bagi anggota Polri yang akan memasuki masa pensiun bagi pangkat Pamen ke bawah. Apabila melihat seorang Perwira Tinggi atau Kombes rata-rata pensiun menjadi komisaris di suatu perusahaan.
- Bagaimana menumbuhkan rasa bangga menjadi anggota Polri dan rasa bangga masyarakat terhadap Polri.
- Program-program apa yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kemampuan SDM dan Kesejahteraan anggota Polri secara riil.
- Perlu peningkatan Sarpras bidang pendidikan yang sangat minim di lembaga pendidikan, misalnya lapangan tembak dan lainnya.
- Apa yang akan Calon Kapolri lakukan dengan adanya dugaan pemberian “upeti” di Kepolisian.
- Meminta penjelasan 3 Kendala utama yang menjadi prioritas di Kepolisian dan harapan Polri untuk mengatasi 3 kendala utama tersebut.
- Komitmen apa yang akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal, antara lain masalah premanisme, pemerasan dan lainnya.
- Saat ini rasa aman masyarakat merasakan kurang aman, termasuk adanya perilaku anggota Polri yang arogan, bagaimana mengatasi hal tersebut.
- Berharap Kapolri bisa tampil sederhana dan ketika menjadi Kapolri melakukan blusukan, sehingga tahu kondisi di lapangan.
- Tahun 1870-an Polsek sebagai basis deteksi, namun sampai dengan saat ini masih sangat lemah, banyak konflik terjadi di daerah, tidak mampu memberikan perkiraan yang baik. Bagaimana konsep calon Kapolri tentang konsep kedepan Polsek sebagai basis deteksi dihubungkan dengan kemampun-kemampuan yang ada dan juga dengan Polmas.
- Kerja sama dalam pencegahan korupsi, dgn KPK, BPK, PPATK. Yang dimaksud dengan kerja sama bentuknya seperti apa.
- Masalah proses penyidikan masih dirasakan hal-hal yang kurang profesional, misalnya masalah kriminilisasi.
- Bagaimana tindak lanjut dalam pelaksanaan “Program keroyok reserse” oleh Kapolri saat ini, dan bagaimana tindak lanjutnya.
- Perlu peningkatan citra melalui pemberitaan yang berimbang, Humas Polri dapat mencontoh kepada Humas KPK.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia Polri melalui pola rekrutmen yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam clean government, sistem apakah yang digunakan Polri untuk hal tersebut.
- Bagaimana calon Kapolri dalam memberikan *reward and punishment* kepada Anggota Polri.
- Perlindungan terhadap anggota Polri, maraknya kasus penembakan anggota Polri di lapangan, apa jaminan bagi keluarga korban yang meninggal dunia.
- Memerlukan Kapolri yang memiliki jiwa negarawan. Polri diharapkan mengawal demokrasi dengan tetap mempertahankan NKRI, karena Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu kini sudah diragukan kredibilitasnya.
- Meminta kepada calon Kapolri pada saat dilantik, jangan mencium tangan presiden. Bedakan penghormatan secara protokoler dengan penghormatan antara yang muda dengan yang lebih tua.
- Dalam Uji Kelayakan ini jangan ada insiden toilet seperti kasus fit and proper test calon hakim agung.

- Meminta komitmen calon Kapolri dalam memberantas mafia hukum di Kepolisian, serta kriminalisasi penegakan hukum oleh oknum-oknum di Kepolisian.
- Meminta Calon Kapolri untuk tangani dugaan mafia hukum atas nama Lucas, SH yang berprofesi sebagai pengacara, dimana ada suatu kasus di NTT namun korban yang dikriminalisasi ditahan di Jakarta. Kasus di Solok Selatan, Pasaman Barat, dll.
- Meminta perhatian calon Kapolri terhadap kasus yang menimpa Amir Mahmud, dimana yang bersangkutan ditahan sampai dengan 11 bulan tanpa adanya surat penahanan.
- Kasus yang menyangkut mantan anggota KPU Andi Nurpati yang belum ada perkembangan lebih lanjut.
- Terkait dengan masalah maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan, apa yang calon lakukan apabila menjadi Kapolri.
- Hasil survey di Tahun 2013 bahwa polisi menjadi salah satu lembaga paling korup di Asia Tenggara dan disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK. Apa langkah yang diambil untuk membersihkan institusi Polri.
- Salah satu persoalan mendasar adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri dengan indikator banyak fasilitas Polri dirusak massa. Pada bulan Januari-Juni 2013 ada sekitar 58 fasilitas yang dirusak dan dibakar masyarakat. Apa langkah-langkah calon untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
- Bagaimana calon Kapolri membentuk Polri yang humanis dan dapat dipercaya masyarakat.
- Bagaimana calon Kapolri melakukan pengamanan asset-asset yang dimiliki oleh Polri.
- Menurut data Pusinfomen Kemendagri terdapat sebanyak 53 konflik terjadi di tanah air. Menjelang Pemilu tahun 2014 akan terjadi eksalasi, bagaimana strategi calon Kapolri meredam potensi konflik dan meredamnya.
- Meminta kepada calon Kapolri untuk dapat membantu dan mengungkap sosok dari Bunda Putri.
- Penyalahgunaan narkoba di daerah Tangerang semakin marak, apakah menjadi skala prioritas oleh calon Kapolri dalam penanganannya serta langkah-langkah terhadap tindak kriminal lainnya.
- Meminta pandangan calon Kapolri terhadap hasil penelitian internal oleh mahasiswa PTIK beberapa tahun yang lalu, dimana beberapa Polda masih terjadi jual beli jabatan di Kepolisian.
- Apa yang menjadi program calon Kapolri dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan saksi yang diberikan apabila aparat di bawah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
- Perlu keteladanan calon Kapolri seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng. Gebrakan mantan Kapolri Jenderal Sutanto agar kembali hadir dengan kepemimpinan calon Kapolri.
- Apakah calon Kapolri berani melakukan ekspose harta kekayaan sebelum dan setelah menjadi Kapolri.
- Meminta kepada calon Kapolri untuk menempatkan petugas liaison officer (LO) Polri di DPR RI dengan pangkat minimal Brigjen dan Irjen.
- Tahun 2013 survey 5 kota besar 1000 orang polisi terkorup, tahun 2012 akhir survey 1400 orang menyatakan polisi paling baik. Jadi polisi di kota lebih korup dari pada di desa. Walaupun tidak menjadi tolok ukur, maka harus ada declear dari Kapolri.
- Meminta komitmen calon Kapolri untuk mengganti kapolda, kapolres yang tidak memenuhi standar, dan tidak berdasarkan penilaian subyektif.

- Masalah anggaran, dalam sistem penganggaran perlu dilihat kembali. Apakah penganggaran telah tepat sasaran, tepat guna dan efektif dalam penggunaannya. Masalah plat nomor dan TNKB perlu dievaluasi. Banyak masalah di lalu lintas terutama pungutan-pungutan. Apa komitmen calon Kapolri dalam melakukan pembenahan di Direktorat lalu lintas.
  - Operasional polri tidak cukup bahkan minus terutama di polsek, Polres dan Polda, salah satu misalnya adalah kebutuhan BBM. Bagaimana calon Kapolri mengatasi hal tersebut.
  - Masalah PPNS, dimana Polri sebagai Korwas dari PPNS. Banyaknya jumlah PPNS seperti PPNS di Badan POM, Bea Cukai, Pajak, dan lain sebagainya dalam penanganan dugaan kasus tindak pidana khusus. Bagaimana Polri sebagai Korwas dari PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS yang banyak tersebar di kementerian/lembaga.
  - Berkenaan dengan penempatan LO, sudah ketiga kali dimintakan, agar dapat ditempatkan calon dengan kepangkatan bintang 1 atau bintang 2 untuk memudahkan komunikasi dengan para Kapolda.
  - Kinerja dan profesionalisme Polri merupakan kerinduan rakyat untuk mendapat keadilan. Apa yang akan dilakukan calon Kapolri agar Polri dapat dicintai dan disegani rakyat.
  - Meminta komitmen calon Kapolri dalam pemberantasan korupsi dan komitmen dalam menindak anggota Polri yang terlibat korupsi.
3. Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs.Sutarman menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.
  4. Setelah selesai melakukan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Komisi III DPR RI melanjutkan dengan Rapat (Pleno) Komisi untuk membicarakan dan membahas mekanisme dalam pembahasan calon Kapolri.
  5. Salah satu pimpinan Komisi III DPR RI membacakan draft surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon Kapolri, sebagai berikut:

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Bertempat tinggal di : .....

.....

.....

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama .....; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan Uji Kelayakan sebagai **Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

**Apabila saya terpilih menjadi Kapolri**, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kapolri untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta **akan menolak atau tidak menerima apapun** secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya **bertanggung jawab sepenuhnya** atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kapolri, apabila saya terpilih menjadi Kapolri.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal ..... Oktober 2013.

Jakarta, ..... Oktober 2013  
Saya yang menyatakan,

( ..... )

6. Setelah rapat (Pleno) Komisi III selesai membahas mekanisme pembahasan calon Kapolri, selanjutnya calon Kapolri memasuki ruang rapat Komisi III untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi.

### III. PENUTUP/KESIMPULAN

1. Pandangan fraksi-fraksi terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Jenderal Polisi Drs.Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
  - 1) F-PD disampaikan oleh Edi Ramli Sitanggang, SH, berpendapat bahwa Komjen (Pol) Drs. Sutarman layak menjadi Kapolri dan Komisi III agar meneruskan hasil fit and proper test dalam rapat paripurna.  
F-PG disampaikan oleh DR. Deding Ishak, bahwa Kapolri harus mampu memimpin menjadi pelayan masyarakat, harus konsisten dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan kasus Bank Century, agar tetap komit untuk bersungguh-sungguh melaksanakan Pemilu legislatif 2014 dan harus menuntaskan agenda reformasi, terutama reformasi kultural. Selanjutnya F-PG menyetujui Komjen (Pol) Drs. Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo.
  - 2) F-PDIP disampaikan oleh Trimedy Panjaitan, SH, MH, menyetujui Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan catatan harus menjaga proses penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM.
  - 3) F-PKS disampaikan oleh HM. Nasir Djamil, menyetujui Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan catatan penempatan pejabat strategis di lingkungan Kepolisian.



- 4) F-PAN disampaikan oleh Taslim, S.Si menyetujui Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan catatan mendesak Komjen (Pol) Drs. Sutarman untuk melakukan akselerasi, untuk kebijakan affirmative action, dan untuk meningkatkan rasa aman.
  - 5) F-PPP disampaikan oleh Ahmad Yani, SH, MH menyetujui pengangkatan Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan berbagai catatan diantaranya terhadap mekanisme pengajuan Calon Kapolri, surat Presiden kepada DPR RI semestinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 11 ayat (2), bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
  - 6) F-KB disampaikan oleh H. Bachrudin Nasori menyetujui pengangkatan Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri.
  - 7) F-P Gerindra disampaikan oleh Desmon Junaidi memberikan catatan tentang prosedur pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden SBY dimana tidak mencantumkan alasan pemberhentian Jenderal (Pol) Drs. Timur Pradopo sebagai Kapolri, namun Fraksi Gerindra tidak ada cukup alasan untuk menolak Komjen Pol Drs.Sutarman.
  - 8) F-P Hanura disampaikan oleh Sarifuddin Sudding, SH, MH menyetujui pengangkatan Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri Selanjutnya mendesak Presiden melengkapi surat dengan mencantumkan alasan sah.
2. Berdasarkan pertimbangan dan pandangan fraksi-fraksi, akhirnya seluruh Anggota Komisi III DPR RI secara aklamasi :

### **MENYETUJUI**

untuk **mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs.Sutarman** sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Komisi III DPR RI **menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Drs.Timur Pradopo** sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Persetujuan Komisi III DPR RI terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPR RI terdekat pada hari Selasa, 22 Oktober 2013.

Rapat ditutup pukul 22.35 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,**

**DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA, MH**





